

POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014-2018

Elika Febriyanti, Hertiningsih Astuti, Endang

*Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 02, Bojonegoro 62119
E-mail : elikafebrianti99@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di kabupaten Bojonegoro dan menjelaskan mengenai peran potensi sumber daya alam terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2014-2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan Kemiskinan di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014-2018 dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kepemilikan sumber daya alam yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang., tingkat pendidikan yang rendah berarti produktivitasnya rendah, sehingga berpengaruh pada akhir yaitu upah menjadi rendah., dan aksesibilitas. kemiskinan akibat dari perbedaan akses permodalan yang dipengaruhi oleh kurangnya pemanfaatan sumber daya yang ada dan kemampuan produktifitas rendah sehingga pembentukan modal menjadi rendah. Adapun peran sumber daya alam terhadap kemiskinan di kabupaten Bojonegoro sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi SDA selama ini. Oleh sebab itu, daerah yang memiliki kekayaan SDA tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi terhadap APBD. Besaran alokasi untuk penanggulangan kemiskinan juga masih dibawah jumlah belanja modal. Jika ditinjau dari rincian belanja modal, secara tidak langsung pembangunan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018 difokuskan untuk menambah bahkan menciptakan nilai produktif melalui belanja modal tersebut berupa aset.

Kata Kunci : Potensi SDA, Regulasi Pemerintah, Kemiskinan.

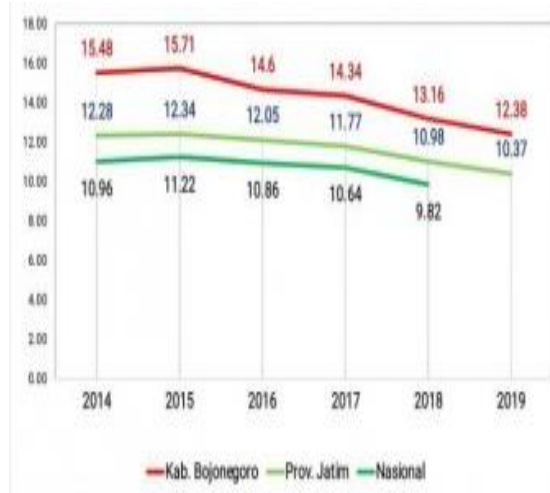
PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak asing untuk dibahas karena keberadaanya yang selalu menjadi topik pembahasan dan

pusat regulasi dari setiap kebijakan. Kemiskinan juga menjadi fenomena sosial ekonomi masyarakat yang selalu terkait dengan konteksnya yang

bersifat lebih spesifik. Akibatnya, permasalahan ini perlu kajian secara komprehensif dari berbagai tingkatan yaitu mengenai kecenderungan pada tingkat makro serta realita pada tingkat mikro dan perlu pula dipahami melalui berbagai perspektif dari berbagai aktor yang terkait (misalnya, *top down perspective* dari para pengambil kebijakan dan para praktisi, termasuk dari pemerintah dan *bottom-up perspective* dari mereka yang mengalami kemiskinan) (Achmadi, 2015). Tingginya tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro hingga menduduki urutan nomor 11 dari kabupaten/kota di Jawa Timur dari angka yang tertinggi.

Gambar 1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi dan Nasional, pada Tahun 2019



Sumber : PEMKAB Bojonegoro, 2019

Tahun 2018 jumlah penduduk miskin juga terus mengalami penurunan hingga

mencapai 13,16 persen. Secara umum, dalam periode 2014-2018 tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan baik secara jumlah maupun presentase. Turunya tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan saat ini di kabupaten Bojonegoro sebesar 12,38%, angka tersebut masih sebagai tren laju angka kemiskinan dimana dampaknya belum dirasa oleh masyarakat seutuhnya. Garis kemiskinan di kabupaten Bojonegoro mempunyai tren meningkat, namun masih di bawah garis kemiskinan tingkat provinsi dan nasional. Kemiskinan di Bojonegoro merupakan permasalahan yang ironis karena Bojonegoro kaya akan sumber daya. Banyaknya penduduk, luas wilayah serta melimpahnya hasil sumber daya alam di kabupaten Bojonegoro menjadi persoalan dalam menanggapi masalah kemiskinan. Terdapat 17 sektor dalam

PDRB tersebut berdasarkan kategori lapangan usaha yang sebagian besar sektor dijabarkan menjadi beberapa subkategori kembali untuk lebih diperinci. Sektor pertambangan dan penggalan yang mempunyai prosentase tertinggi dalam angka PDRB Bojonegoro tahun 2018. Meskipun pertambangan merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan tetapi keberadaanya mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap sumber pendapatan negara maupun daerah jika dilihat dari hasil yang mampu diperolehnya. Urutan selanjutnya ada sektor pertanian yang mempunyai hasil unggulan yaitu padi, jagung, jenis polowijo, tembakau serta pohon jati yang menjadi andalan petani Bojonegoro. Keberadaan sektor migas tersebut sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2011 tentang percepatan-percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan

minyak dan gas bumi di kabupaten Bojonegoro. Semakin tinggi produksi migas maka akan semakin tinggi pula alokasi DBH dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten dengan dana bagi hasil terbesar di Indonesia, tidak kurang dari 728 miliar masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (katadata/2 juni 2017). Anggaran Penerimaan Belanja Daerah kabupaten Bojonegoro hampir 75% diperoleh dari DBH sumber daya alam berupa gas alam dan minyak bumi yang tersebar diberbagai titik. Kondisi DBH tersebut juga akan berpengaruh terhadap dana perimbangan keuangan daerah yang terdiri dari DBH pajak, DBH non pajak atau SDA, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Zainudin (2017) mengatakan bahwa Bojonegoro kota kecil yang penuh dengan hasil sumber daya alam yang bisa kita temui. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah kaya dan melimpah potensi berupa sumber daya alam maupun

sumber daya manusia, tetapi tidak diimbangi dengan dengan kondisi sosial masyarakatnya yang masih mengalami permasalahan sosial yaitu kemiskinan dengan angka prosentase yang relatif tinggi. Peraturan Pemerintah, kebijakan normatif maupun Otda diharapkan mampu lebih mengoptimalkan kebebasan dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki. Potensi tersebut yang nantinya dapat dijadikan sebagai tombak pembangunan suatu daerah, salah satunya meminimalisir permasalahan kemiskinan. Dari uraian tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian apa yang sebenarnya terjadi dengan tingkat kemiskinan di wilayah yang kaya sumber daya alam ini, dengan tujuan untuk Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro serta Menjelaskan mengenai peran potensi sumber daya alam terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2014-2018. Sehingga penelitian ini diambil dengan

judul **Potensi Sumber Daya Alam Dan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018.**

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Terori baru pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis sumber daya alam menjelaskan bahwa potensi kekayaan sumber daya alam (*resource endowment* atau *factor endowment*) yang dimiliki sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah, wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang potensial, umumnya perkembangannya lebih maju jika dibandingkan dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang kurang. Menurut teori ini, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua diantaranya: faktor ekonomi (seperti sumber daya alam, kemajuan teknologi, dll) dan faktor non ekonomi (meliputi sumber daya manusia, faktor sosial, dll) yang disampaikan oleh North (1964) pada buku Arsyad (2010).

Pembangunan Daerah

Menurut Arsyad (2010) Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Regulasi Pemerintah

Pemerintah daerah menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Kemiskinan

Kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat, ternyata kemiskinan juga berkaitan dengan kepemilikan atas faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat, serta berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan (Arsyad, 2010).

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2006) antara lain :

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya

upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

- c. Miskin muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal.

Meier & Baldwin (1957) dalam buku Arsyad (2010) mengemukakan suatu konsep lingkaran kemiskinan timbul dari hubungan yang saling mempengaruhi antara kondisi masyarakat yang masih terbelakang (tradisional) dan kekayaan alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif deskriptif yang bersifat deduktif dengan artian bahwa data yang dikumpulkan adalah data kualitatif.

Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di kabupaten Bojonegoro.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan serta peran potensi sumber daya alam terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018.
3. Analisis kualitatif deskriptif dilakukan untuk menggambarkan keadaan sosial terkait potensi sumber daya alam berupa minyak alam dan gas bumi atau migas yang hasilnya berupa Dana Bagi Hasil (DBH). Kontribusi dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) tersebut termasuk salah satu sumber penerimaan Anggaran Penerimaan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro dimana salah satu realisasinya untuk menggapai permasalahan sosial berupa kemiskinan pada tahun 2014-2018.

4. Model interkatif dalam analisis data dilakukan untuk membatasi pembahasan terkait sumber data yang diperoleh, yaitu DBH SDA dan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini khusus pada DBH dari atau sebagai daerah penghasil, yaitu sumber daya alam mineral berupa minyak bumi dan gas alam atau migas dan tingkat Kemiskinan.
5. Sebagai penunjang penelitian diperlukan salinan dokumen APBD, Perda RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah) kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018, serta tingkat kemiskinan pada tahun yang bersangkutan yaitu 2014-2018 di kabupaten Bojonegoro.

Sumber Data/Informan Penelitian

Penelitian kualitatif ini dalam pengambilan sumber data atau menentukan informan penelitian menggunakan teknik *Snowbal Sampling*.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa model Miles dan Huberman (1984) dalam buku Arsyad (2010) yang mengemukakan bahwa Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

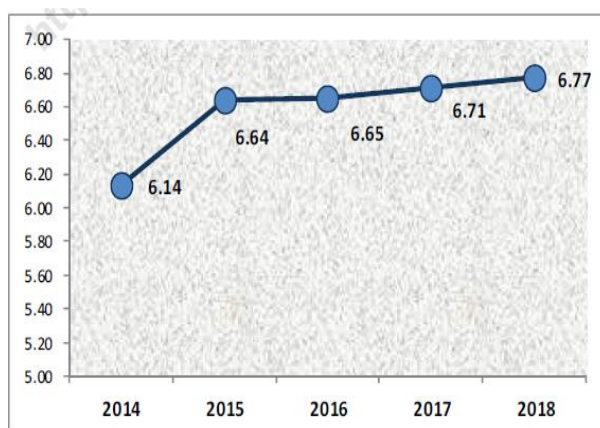
Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro

Penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro tersebar diberbagai wilayah perkotaan maupun pedesaan dengan berbagai faktor penyebab, katakarakteristik serta pola kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan yang terjadi di kabupaten Bojonegoro tidak terlepas dari keberadaan sumber daya alam yang besar serta regulasi dari pemerintah daerah maupun pusat. Sehingga perlu kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas kebutuhan *sustainable developmen* kabupaten Bojonegoro. Kondisi kemiskinan di kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh berbagai faktor dan penyebabnya. Dalam menentukan faktor-faktor kemiskinan peneliti mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Kuncoro (2006). Faktor-faktor tersebut antara lain, 1. perbedaan ketersediaan sumber daya alam, Kemiskinan kabupaten Bojonegoro berada di daerah yang terdapat sumber daya alam

yang besar, akan tetapi belum mampu mencukupi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Dalam penelitian ini, menjawab bahwa keunggulan di sumber daya alam ada di beberapa sektor, seperti bidang pertanian tersebut secara signifikan belum mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup secara agregat karena masyarakat kabupaten Bojonegoro bekerja di bidang pertanian sebagai pihak penyewa atau buruh tani dalam penggarapan bukan sebagai pemilik lahan yang mempunyai wewenang luas atas hasil panenya. Begitu juga di kawasan kehutanan yang mayoritas dikuasi oleh perhutani, sehingga masyarakat yang bekerja belum mampu secara langsung memaksimalkan pemanfaatan dari hasil karena keterbatasan. Adapun sumber daya alam lain yaitu di sektor pertambangan yang kabupaten Bojonegoro unggul di subsektor migas. Keberadaan migas di kabupaten Bojonegoro tidak menyerap tenaga kerja banyak di banding dengan pertanian, karena keberadaanya di kelola oleh sektor

swasta dari luar daerah kabupaten Bojonegoro. 2. kualitas penduduk dengan tingkat pendidikan yang ditempuh, Jika mengacu pada keadaan tersebut tingkat pendidikan di kabupaten Bojonegoro masih rendah meskipun berdasarkan data Statistik setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam angka partisipasi sekolah. Pendidikan rendah berpengaruh pada produktifitas rendah sehigga upah yang diterima juga rendah.**Gambar 3.**

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Bojonegoro, 2018

Gambaran tersebut merupakan cerminan kualitas penduduk kabupaten Bojonegoro dari dimensi pendidikan yang masih rendah. Rendahnya pendidikan berpengaruh pada kelangsungan kebutuhan hidup, karena hal tersebut merupakan salah

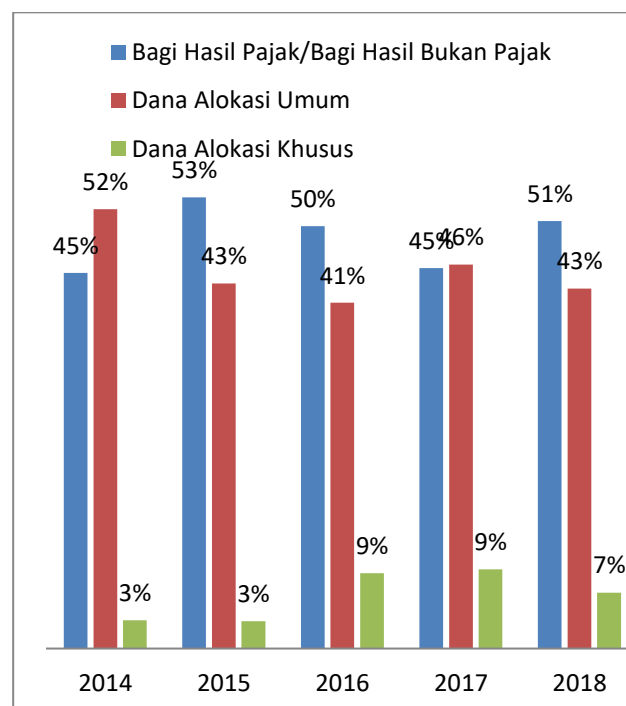
satu indikator dalam pembangunan manusia yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan. Tingkat pendidikan identik dengan jenis pekerjaan yang dijalani sehingga dapat berpengaruh pada hasil yang diperoleh. Hasil tersebut merupakan imbalan dari produktifitas yang dilakukan dalam waktu tertentu bisa berupa gaji maupun upah .

serta 3. aksesibilitas dalam permodalan. Penduduk miskin di kabupaten Bojonegoro termasuk dalam konsep lingkaran kemiskinan timbul dari hubungan yang saling mempengaruhi antara kondisi masyarakat yang masih terbelakang (tradisional) dan kekayaan alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sehingga dari sifat tersebut menyebabkan produktifitas rendah yang menyebabkan dorongan untuk menabung minim, kegiatan penanaman modal kurang dan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah. Dengan demikian sangat berpengaruh pada akses permodalan masyarakat untuk kegiatan ekonomi.

Peran Sumber Daya Alam Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten Bojonegoro cukup besar salah satunya bisa dilihat dari letak geografis, dimana sebaran penggunaan lahan dan potensi sumber daya alam yang ada dapat diidentifikasi menjadi potensi-potensi yang dapat dikembangkan secara optimal. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam konteks otonomi akan terlaksana dengan optimal apabila diikuti dengan pemberian pendapatan yang cukup. Hal tersebut bermaksud pada penggunaan sumber daya alam yang potensial sebagai sumber penerimaan daerah untuk mempercepat pembangunan daerah sehingga semakin dekat dengan kesejahteraan. Berdasarkan sumber pendapatan daerah, bahwa dana perimbangan hampir 70% menjadi sumber penerimaan terbesar APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018. Masing-masing dana perimbangan tersebut

memiliki fungsi yang berbeda-beda. **Gambar 4.**



Rincian tersebut salah satu bukti bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang kaya sumber daya alam berupa Migas (minyak bumi dan gas bumi) dilihat dari persentasenya. Terkait dengan peran dari sumber daya alam itu sendiri secara tidak langsung harus mengetahui rincian DBH yang ada dalam APBD kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018. pada tahun 2014 DBH SDA menyumbang 24 % dari jumlah APBD kabupaten Bojonegoro, tahun 2015 dengan 28%, tahun 2016 adalah 25 %, tahun 2017

adalah 24% dan tahun 2018 adalah 28%. Penentuan dan pembagian DBH sektor migas yang diterima oleh kabupaten Bojonegoro sesuai dengan wewenang pemerintah pusat mulai dari penerimaan yang berhak atas DBH tersebut hingga jumlah nominal yang akan diterima. Penentuan tersebut disesuaikan dengan hasil produksi sektor migas di setiap tahunnya. Dana alokasi terhadap permasalahan kemiskinan bisa lihat dari komposisi belanja tidak langsung dalam APBD kabupaten Bojonegoro. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan bagian dari belanja tidak langsung pada APBD Kabupaten Bojonegoro dan sementara ini dapat dikatakan sebagai bagian dari APBD untuk masyarakat (miskin) (LP2KD Kab. Bojonegoro, 2019). Selama kurun waktu tahun 2014-2018 menempati proporsi relatif kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja bantuan hibah presentasenya senantiasa meningkat dari

tahun ke tahun, sedangkan belanja bantuan sosial cenderung menurun.

Jika dijumlahkan antara belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada tahun 2014 sebesar 1,62%, tahun 2015 adalah 1,82%, tahun 2016 adalah 1,52%, tahun 2017 adalah 2,78% dan tahun 2018 sebesar 4,30% merupakan jumlah anggaran belanja yang diperoleh dari APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018. Penjumlahan tersebut berdasarkan peranan dari komponen belanja yang kegunaanya untuk masyarakat miskin. Jika DBH SDA mampu sebagai sumber penerimaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 25%, angka tersebut tidak sebanding dengan persentase yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan yang mempunyai angka masih relatif kecil. Besaran alokasi untuk penanggulangan kemiskinan juga masih dibawah dari komponen belanja langsung dari jumlah belanja modal. Jika ditinjau dari rincian belanja modal, secara tidak langsung pembangunan daerah kabupaten

Bojonegoro tahun 2014-2018 difokuskan untuk menambah bahkan menciptakan nilai produktif melalui belanja modal tersebut. Harapan besar dari output belanja modal tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya. Sehingga pemerataan pendapatan dapat terpenuhi dan kualitas sumber daya manusia dapat diimbangi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kemiskinan di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014-2018 dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kepemilikan sumber daya alam, tingkat pendidikan, dan aksesibilitas. Berdasarkan Sumber daya alam, kemiskinan dikarenakan adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya alam yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Berkurangnya lahan pertanian, penyewa sawah (buruh tani) dan pesanggem yang terbatas pada hak dan kewenangan

hasil sumber daya alam. Tingkat pendidikan, Kemiskinan terjadi akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah berarti produktivitasnya rendah, sehingga berpengaruh pada akhir yaitu upahmenjadi rendah. Dan berdasarkan aksesibilitas, kemiskinan akibat dari perbedaan akses permodalan yang dipengaruhi oleh kurangnya pemanfaatan sumber daya yang ada dan kemampuan produktifitas rendah sehingga pembentukan modal menjadi rendah dalam aktifitas perekonomian.

2. Adapun peran sumber daya alam terhadap kemiskinan di kabupaten Bojonegoro sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas

eksploitasi SDA selama ini. Oleh sebab itu, daerah yang memiliki kekayaan SDA tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi terhadap APBD, Rincian persentase sebagai berikut, pada tahun 2014 DBH SDA menyumbang 24 % , tahun 2015 dengan 28%, tahun 2016 adalah 25 %, tahun 2017 adalah 24% dan tahun 2018 adalah 28%. Sedangkan untuk penanggulangan kemiskinan dari belanja hibah dan belanja sosial dengan rincian tahun 2014 sebesar 1,62%, tahun 2015 adalah 1,82%, tahun 2016 adalah 1,52%, tahun 2017 adalah 2,78% dan tahun 2018 sebesar 4,30%. Besaran alokasi untuk penanggulangan kemiskinan juga masih dibawah jumlah belanja modal. Jika ditinjau dari rincian belanja modal, secara tidak langsung pembangunan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2014-2018 difokuskan untuk

menambah bahkan menciptakan nilai produktif melalui belanja modal tersebut dalam bentuk aset.

Saran

1. Kabupaten Bojonegoro mempunyai potensi sumber daya alam besar yang hendaknya dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peran dan kedudukannya demi kehidupan yang lebih baik masyarakat kabupaten Bojonegoro, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan masyarakat.
2. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam hal pembangunan daerah harusnya lebih mengfokuskan pada permasalahan kemiskinan yang sedang dihadapi. Salah satu usaha yang perlu ditingkatkan yaitu memberikan

pelatihan yang kreatif, inovatif dengan memanfaatkan potensi lokal dengan baik secara berkelanjutan sesuai dengan regulasi pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro. Tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang yang sifatnya nasional, karena pada dasarnya kondisi potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. 2015. *Memahami Pola-Pola Keluar dari Kemiskinan : Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro*. Volume 19 Nomor 02.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro.[http://www.jariungu.com/peraturan_detail.php?Peraturan-Daerah-Kab--Bojonegoro-\(Perda-Kab--Bojonegoro\)-23-tahun-2011-tentang-Percepatan-Pertumbuhan-Ekonomi-Daerah-Dalam-Pelaksanaan-Eksplorasi-Dan-Eksploitasi-Serta-Pengolahan-Minyak-Dan-Gas-Bumi-Di-Kabupaten-Bojonegoro&idPeraturan=28196#:~:text=Peraturan%20Daerah%20Kab.,Gas%20Bumi%20Di%20Kabupaten%20Bojonegoro](http://www.jariungu.com/peraturan_detail.php?Peraturan-Daerah-Kab--Bojonegoro-(Perda-Kab--Bojonegoro)-23-tahun-2011-tentang-Percepatan-Pertumbuhan-Ekonomi-Daerah-Dalam-Pelaksanaan-Eksplorasi-Dan-Eksploitasi-Serta-Pengolahan-Minyak-Dan-Gas-Bumi-Di-Kabupaten-Bojonegoro&idPeraturan=28196#:~:text=Peraturan%20Daerah%20Kab.,Gas%20Bumi%20Di%20Kabupaten%20Bojonegoro) . diakses pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 15.43 WIB
- Zainudin. (2017). *Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Sebagai Bahan Konstruksi Pembangunan Waduk Dongseng Bojonegoro*. Volume 1 Edisi 2 ISSN 2502-3152.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang OTODA. <https://komisiinformasi.go.id/?p=1628>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 13.23 WIB
- Arsyad, Lincoln, 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. 2018. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2018 Kabupaten Bojonegoro*. Pemkab Bojonegoro.

- Badan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bojonegoro. 2018. *Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2013-2018*.
Pemkab Bojonegoro.
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten
Bojonegoro. 2018. *Rincian
APBD Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2014-2018*. Pemkab
Bojonegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi
Pembangunan Teori, Masalah,
dan Kebijakan*. Yogyakarta:
UPPSTIM YKPN.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis*.
Bandung: ALFABETA.